

## Posisi Broker Dalam Ikatan Patronase Sebagai Wujud Kelas Menengah Komunitas Petani di Pedesaan Sulawesi Selatan

*The Position of Brokers in Patronage Ties as a form of The Middle Class Farming Community in Rural South Sulawesi*

**Iskandar\*, Kamrin**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

\*email: iskandar@universitasbosowa.com

Diterima: 4 September 2022 /Disetujui: 27 Desember 2022

### Abstrak

Terbentuknya ikatan vertikal dan horizontal tidak terlepas dari akses para penghubung yang berperan sebagai broker di kedua jaringan patronase di pedesaan Sulawesi Selatan. Perbedaan posisi patron dan posisi broker terbedakan oleh distribusi sumber daya (patron penyedia sumber daya dan broker sebagai penyalurnya), sedangkan posisi broker dengan klien terbedakan oleh nilai konsumsi sumber daya (broker menyalurkan sumber daya yang bukan miliknya dan klien menerima sumber daya tersebut). Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus ditemukan bahwa keberadaan broker sebagai salah seorang patron di ikatan vertikal ini dapat dikaitkan dengan fenomena pasang surutnya tiga masalah ketimpangan sosial di tiga wilayah (kemiskinan, pengangguran, dan konflik), di balik ketiga kasus tersebut. Sedangkan peran broker sebagai perantara dengan patronhanya meladeni kelompok atas masyarakatnya yang minoritas dan berkecukupan dalam hidup, di sisi lain kebrokerannya tidak menyentuh golongan bawah yang jumlahnya mendominasi penduduk, serta sangat membutuhkan uluran penanganan di sektor pekerjaan dan pendidikan.

**Kata Kunci:** Broker, Patronase, Kelas Menengah, Petani, Sulawesi Selatan

### Abstract

*The formation of vertical and horizontal ties is inseparable from the access of intermediaries who act as brokers in both patronage networks in rural South Sulawesi. The difference between the position of the patron and the position of the broker is distinguished by the distribution of resources (the patron provides resources and the broker as the distributor), while the position of the broker and the client is distinguished by the consumption value of the resource (the broker distributes resources that are not his and the client receives these resources). Using a qualitative approach and case study method, it was found that the existence of a broker as a patron in this vertical tie can be associated with the phenomenon of the ups and downs of three problems of social inequality in three areas (poverty, unemployment, and conflict), behind the three cases. While the role of brokers as intermediaries with patrons only serves the upper class of society who are in the minority and are well-off in life, on the other hand the brokerage does not touch the lower class whose numbers dominate the population, and really need help handling in the employment and education sectors.*

**Keywords:** Broker, Patronage, Middle Class, Farmer, Sulawesi Selatan



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Peranan broker dalam ikatan patron-klien menurut Powell (1970) adalah menjembatani kesenjangan hubungan antar para patron di tingkat atas dan para klien di tingkat bawah. Oleh karenanya menurut Powell (1970) bahwa posisinya terkadang berubah-ubah dalam mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan

menurut Scott (1972) bahwa peranan perantara tidak dapat dipisahkan dengan tujuan ikatan patron-klien itu sendiri, sebab kehadirannya sebagai “anchor” kepentingan patron dan klien dalam ikatan patronase. Oleh karenanya Scott menempatkan salah satu elements of exchange di solidaritas vertikal sebagai peranan khusus, yakni seorang patron harus mampu menjadi brokerage and influence terhadap klien dan keluarganya maupun terhadap masyarakat pedesaan. Menurut Boissevain (1969) bahwa peranan broker tidak jauh berbeda dengan peran patron dan klien dalam ikatan patronase, bahkan terkadang kedua pihak ini memainkan peranan broker tersebut. Dan menurut Paine (1971) bahwa terkadang ketiga pihak ini sulit dibedakan peranannya.

Adapun untuk membedakan peranan patron, broker, dan klien dalam ikatan patron-klien, menurut Paine (1971) maka rumusnya adalah, posisi patron dan posisi klien ini terbedakan oleh ketimpangan sumber dayanya masing-masing, posisi patron dan posisi broker terbedakan oleh distribusi sumber daya (patron penyedia sumber daya dan broker sebagai penyalurnya), sedangkan posisi broker dengan klien terbedakan oleh nilai konsumsi sumber daya (broker menyalurkan sumber daya yang bukan miliknya dan klien menerima sumber daya tersebut). Sedangkan menurut Legg (1983) bahwa perbedaan peranan ketiga pihak ini dalam ikatan patron-klien adalah posisi broker ditentukan oleh peranannya dan bukan ke orangnya, sedangkan posisi patron ditentukan oleh statusnya yang tinggi, dan posisi klien ditentukan oleh statusnya yang lebih rendah.

Dalam teori ketergantungan, gambaran broker di atas identik dengan pandangan Paul Baran (1970) yakni tentang posisi kaum atau bangsa komprador yang menjadi perantara dagang antar kaum kapitalis dengan negara-negara terbelakang. Menurut Baran (1970) bahwa kaum komprador juga terdiri dari dua jenis, yakni komprador di tingkat elit dan komprador kelas bawah. Komprador di tingkat elit adalah kaum yang tersisih dari struktur atas masyarakatnya namun memiliki sumber daya yang sederajat dengan kaum elitis (utamanya ekonomi) dan intens bermobilitas sosial dengan kaum elitis demi pencapaian kesederajatan yang lain. tersebut. Sedangkan komprador kelas bawah adalah kaum yang tersisih dari kelas bawah masyarakatnya yang berusaha naik ke kelas menengah melalui mobilitas pekerjaan yang berbeda dari masyarakatnya (seperti makelar, rentenir, dagang, dan pekerja jasa lainnya). Dalam kajian ini, konsep komprador akan dikomparasikan dengan konsep-konsep broker lainnya.

Dalam kajian-kajian masyarakat pedesaan di Indonesia, peranan broker cenderung di kesampingkan sebagai salah unsur dalam proses stratifikasi sosial, bahkan peranannya terkadang menjadi stereotip dalam realitas kehidupan petani (seperti menjadi rentenir, tukang kredit, lintah darat, dan makelar yang oportunistis). Padahal menurut Boissevain (1969), Paine (1971), dan Legg (1983), bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka adalah pekerjaan menantang dan membutuhkan pengetahuan tersendiri dalam menjalankannya, di sisi lain keberadaannya tidak hanya ada pada masyarakat pedesaan namun juga ada pada masyarakat yang paling moderen sekalipun.

Fenomena ini sesuai temuan Asraf (1989), Haerani (1996), dan Parakkasi (1992) dalam menjelaskan posisi ikatan patron-klien dan modernisasi pertanian di tiga wilayah. Bagi temuan Asraf (1989) dan Haerani (1996), keberadaan broker di wilayah penelitiannya digambarkan sebagai pihak yang menyangkut stereotip tersebut. Sedangkan temuan Parakkasi (1992:77-81) menggambarkannya sebagai pihak yang turut mensukseskan keberhasilan usaha agrobisnis di Wonomulyo, dimana seorang patron terkadang menjadi broker dari patron-patron lain dan para kliennya dalam urusan dengan pihak luar (lembaga atau pejabat), ataupun menjadi broker oleh pihak luar yang ingin mengembangkan bisnisnya di wilayah ini. Gambaran Parakkasi sejalan dengan teori Boissevain (1969) dan Paine (1971) bahwa yang khas dari peranan broker ini adalah berperan ganda dalam ikatan

patron-klien, di samping sebagai middlemen juga terkadang memainkan tiga peran secara berbeda-beda dalam patronase (sebagai patrons, klien, dan go-betweens), bahkan dalam kondisi tertentu ia mampu berperan dalam tiga posisi sekaligus dalam ikatan patronase. Dalam kajian lain, posisinya juga dianggap sebagai pemicu mobilitas sosial pada berbagai komunitas. Temuan Salman (2002) menyebutkan bahwa kehadiran broker (yang diperankan oleh pengusaha Cina) mampu mendinamisasikan industrialisasi pernelayanan di Bulukumba. Temuan yang lain oleh Sunyoto (2004) menyebutkan bahwa para patron di Situbondo di satu sisi menjadi broker dari warga keturunan Cina kaya untuk urusan birokrasi dan dalam masalah-masalah kemasyarakatan dan dari hubungan tersebut para patron dan kliennya terlibat dalam berbagai usaha warga Cina tersebut.

Adapun peranan broker dalam ikatan vertikal dan ikatan horizontal, menurut Boissevain (1969) dan Paine (1971) bahwa kedua hal tersebut memiliki orientasi yang berbeda. Menurut Boissevain (1969) dan Scott (1972) bahwa peranan broker dalam ikatan vertikal, cenderung diperankan oleh para patron dalam proses reversible relationships atau menurut Scott sebagai manifestasi dari peran patron yang sifatnya brokerage and influence. Dalam orientasi reversible relationships, peran-peran broker adalah menjadi koneksi dari kepentingan sesama patron dan klien dengan pihak luar, serta menjadi fasilitator kepentingan orang luar di wilayahnya. Walaupun demikian, posisi broker yang diperankannya adalah demi kelanggengan posisi patronnya di ikatan vertikal. Temuan Hendrikson (1971:22-33) di Amerika Utara, menyebutkan bahwa para patron di daerah tersebut akan bertahan di posisinya apabila ia mampu menjadi broker dari kliennya untuk urusan-urusan birokrasi dan perdagangan, di sisi lain ia menjadi klien untuk pihak-pihak tersebut (birokrat dan pengusaha) yang memiliki urusan di wilayahnya.

Sedangkan di ikatan horizontal, posisi broker menurut Paine (1971) dan Legg (1983) adalah cenderung diperankan oleh para klien yang melakukan mobilitas sosial dalam proses aliansi personal. Peranan yang dimainkan dalam proses ini umumnya sebagai seorang interpreneure baik di kegiatan perdagangan maupun di kegiatan bisnis jasa lainnya. Temuan Syamsuddin (1990:102) menyebutkan bahwa para petani klien di Maros memiliki profesi ganda dalam kesehariannya, yakni menjadi makelar tanah, tukang kredit, dan penyalur tenaga buruh tani, dari pekerjaan gandanya ini umumnya mereka beralih status menjadi patron dalam kelompok-kelompok kecil. Dari berbagai uraian disimpulkan bahwa peranan broker dalam ikatan patron-klien, ini memiliki dua karakter yang berbeda di kedua ikatan. Pada ikatan vertikal, ia diperankan oleh para patron untuk kepentingan reversible relationships atau komprador elit, demi memperkuat posisinya di ikatan vertikal. Sedangkan dalam ikatan horizontal ia diperankan oleh klien, dimana posisi broker yang ia perankan mewakili kondisi sosial ekonomi masyarakatnya atau komparador kelas bawah, yang kehadirannya bertujuan demi terciptanya proses mobilitas sosial atau terciptanya peralihan posisi dalam ikatan patron-klien

## **B. METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam mengungkap keberadaan broker dalam ikatan Patronase di pedesaan Sulawesi Selatan. Alasan digunakannya pendekatan ini adalah peneliti ingin menggambarkan lebih mendalam dan kongkrit tentang proses terbentuknya dan intensitas para broker di ikatan patronase pada era modernisasi di pedesaan Sulawesi Selatan. Jenis penelitian studi kasus biasanya digunakan untuk mengungkapkan makna sosio-kultural dengan cara mempelajari pola hidup serta interaksi antar kelompok sosio kultural (culture sharing group) tertentu di dalam sebuah ruang ataupun konteks yang spesifik (Spradley 1980; Sugiyono 2010). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berbentuk wawancara

mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya kegiatan analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode kategosasi data dan interpretasi data. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan (dari januari hingga juli 2019) dan sampel penelitian yang digunakan adalah model purposive sampling dengan obyek penelitian berada di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto yang mewakili suku Bugis dan suku Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagi masyarakat Amparita, Latang adalah broker yang menjadi perantara orang-orang penting di Amparita untuk berbagai urusan di lembaga pemerintah dan Perbankan. Sebagai broker yang mulai terkenal luas dikalangan orang-orang sekomunitasnya (orang Tolotang), sebenarnya ia terbilang baru untuk urusan perantara. Hal itu karena dahulunya diperankan oleh orang-orang Bugis pendatang yang manjadi broker bagi orang-orang setempat untuk terlibat di berbagai proyek-proyek revolusi hijau. Namun setelah proyek pertanian macet, posisinya diambil alih oleh orang-orang asli setempat (berasal dari etnis Tolotang), dengan versi yang berbeda. Munculnya Latang yang berdiferensiasi peran dari patron menjadi broker, ini di latari oleh terjadinya pergeseran sikap mereka terhadap pentingnya pendidikan dan pekerjaan formal sebagai simbol status moderen. Pergeseran ini berpengaruh pada mobilitas pekerjaan formal di Amparita, dimana mulai nampak di isi oleh orang-orang setempat. Dan pergeseran ini berkorelasi dengan meluasnya peran-peran broker yang berasal dari “orang dalam” plus berbagai seluk beluk kepentingan publik yang ia kuasai, untuk dipertukarkan ke pihak patron lain yang tidak mahir di bidang tersebut.

Bagi warga Amparita, Pak Latang contoh broker yang mereka kenal sebagai orang asli Tolotang yang eksis menjadi perantara dan seorang pegawai pemerintah juga patron dengan beberapa orang pajjama di bisnis pertanian dan non-tani. Arah diferensiasi peran Latang berada di seputar urusan dengan para birokrat dan kalangan Perbankan. Menjadi broker untuk urusan birokrasi, umumnya untuk urusan sertifikat tanah, urusan pajak, urusan kelengkapan kredit di bank, dan urusan pendirian badan usaha. Sedangkan menjadi broker dengan orang Bank, umumnya mengenai pengambilan kredit, perpanjangan kredit, dan urusan penunggakan kredit. Luasnya wilayah kerja Latang, menjadikan ia terkenal hingga kabupaten dan provinsi, sehingga terkadang ia menjadi broker reversible relationships untuk urusan bolak balik, yakni kadang broker untuk orang-orang Amparita dan kadang pula untuk orang luar yang berkepentingan di Amparita. Sebagai broker yang sekaligus patron, kediaman Latang juga terkadang menjadi tempat menginap tamu-tamu yang berasal dari luar Amparita karena memiliki kepentingan kerja di wilayah ini untuk beberapa hari.

Dalam teori ikatan patron-klien, diferensiasi peran kebrokeran Latang identik dengan penggarisan Boissevain (1969) tentang arah reversible relationships atau broker sejenis koneksitor di berbagai urusan publik, dan penggarisan Scott (1972) tentang brokerage and influence atau broker berperan ganda. Namun ia belum termasuk broker seperti penggarisan Baran (1970) tentang komprador di tingkat elit, karena pada jenis ini seorang broker harus memiliki kapabilitas kaliber yang langsung bermain dengan kaum elitis kelas kakap dan menguasai seluruh arus sumber daya. Dengan demikian, kemungkinan Latang masuk komprador kelas teri, kalau mesti dikaitkan dengan teori Baran ini.

Observasi dan wawancara kedua (berlangsung 27 juni 2019 dan informan) adalah dengan Ridwan sebagai broker yang dewasa kini menjadi perantara patron lain atau elitis untuk urusan kepentingan politik. Sebagaimana Latang, Ridwan juga adalah seorang patron (memiliki belasan orang klien di pertambakan) dan juga seorang pegawai pemerintah golongan menengah di Pemda setempat. Sebelum menjadi broker politik di

Pemilu lalu, warga mengenal lama Ridwan sebagai perantara untuk urusan penerimaan pegawai di kantor-kantor pemerintah (baik di daerahnya maupun di daerah lain), perantara urusan kenaikan pangkat maupun eselon bagi seorang PNS, dan dalam pendidikan kedinasan. Untuk broker politik di pemilu baru lalu, cara kerja Ridwan adalah mengklaim wilayah tertentu sebagai wilayah yang dapat ia dikuasai suara pemilihnya melalui pendekatan keluarga dan kapabilitas pribadinya, selanjutnya menawarkan ke para caleg maupun ke partai politik untuk dibarter dengan uang ataupun berupa barang berharga lainnya. Dengan demikian, diferensiasi peran kebrokerannya saat ini berada di sektor politik.

Sebagai broker politik, latar belakang keluarga besar Ridwan memang mendukung karir barunya ini. Walaupun ia bukan komunitas setempat (mengaku berasal dari Kabupaten Bantaeng), namun mertuanya adalah tokoh masyarakat dan berasal dari kaum Karaeng yang disegani, serta ia mantan tokoh pemuda di wilayah ini yang banyak berinteraksi dengan organisasi dan partai politik di era orde baru. Dengan latar belakang tersebut, beberapa titik wilayah di Bontorannu dan wilayah di luar Bontorannu, diklaim sebagai wilayah kekuasaan politik keluarga besar ataupun di bawah kekuasaannya pribadi, walaupun ia dan keluarga besar tidak menjadi pengurus partai ataupun mencalonkan diri sebagai caleg (karena PNS) dalam pemilu tersebut. Untuk menjalankan aktivitas kebrokeran politiknya, ia juga bekerja sama dengan para elitis atau kaum Karaeng setempat (wilayah yang diklaim) untuk menghimpun suara para pemilih (yang juga terdiri dari para klien vertikal) untuk memilih partai dan calon yang ditunjuk oleh Ridwan. Adapun hasil kebrokeran politik di pemilu lalu, menurutnya, hanya 2 orang (dari 4 orang) yang lolos menjadi anggota legislatif kabupaten, dan imbalan berupa materi cukup lumayan untuk menambah keuangan keluarga, di sisi lain jaringan kerja juga makin luas melalui kedua orang caleg itu di hari selanjutnya.

Dalam teori ikatan patron-klien, diferensiasi peran kebrokeran Ridwan sebagai perantara politik identik dengan penggarisan Legg (1983) dan Hendrikson (1971) tentang eksistensi posisi broker sebagai perantara suara pemilih dalam dunia politik. Menurut Legg (1983) bahwa, di negara yang lebih moderen, posisi broker untuk kepentingan politik lebih jelas eksistensinya ketimbang di kehidupan sosial kultural, sebab perannya sederajat dengan pengurus partai dalam menempatkan seseorang menjadi anggota parlemen, walaupun sistem barter jasanya menggunakan uang dan materi lainnya. Sedangkan menurut Hendrikson (1971) bahwa, peran broker sebagai perantara di dunia politik, juga mengutamakan pertukaran jaringan kerja yang lebih luas, dimana jaringan yang telah diraih itu menjadi peluang baru untuk memperlebar dunia kebrokeran selanjutnya. Mengacu teori ini maka dapat diprediksi bahwa peluang broker politik untuk hadir mewarnai dinamika perkembangan ikatan patron-klien di bidang politik pada masa datang cenderung semakin meningkat eksistensinya.

Sejauh mana keberadaan broker sebagai salah seorang patron di ikatan vertikal ini dapat dikaitkan dengan fenomena pasang surutnya tiga masalah ketimpangan sosial di tiga wilayah (kemiskinan, pengangguran, dan konflik), di balik ketiga kasus tersebut. Bagi broker Latang di Amparita, menjadi perantara urusan-urusan birokrasi dan jasa Perbankan bagi para patron dan elitis, tentunya hal ini hanya memperluas masalah internal yang dialami warga masyarakat Amparita. Pada bagian lain menyebutkan bahwa meluasnya ketimpangan kepemilikan sumber daya antar golongan "Uwe" (patron) dan golongan "Paruwe" (klien) adalah karena semakin meluasnya kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan di Amparita. Hal ini menandakan bahwa arah kebrokeran Latang di dua lembaga itu hanya meladeni kelompok atas masyarakatnya yang minoritas dan berkecukupan dalam hidup, di sisi lain kebrokerannya tidak menyentuh golongan bawah

yang jumlahnya mendominasi penduduk, serta sangat membutuhkan uluran penanganan di sektor pekerjaan dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebrokeran Latang berkorelasi dengan meluasnya 3 kondisi ketimpangan sosial di Amparita.

Dalam teori ikatan patron-klien, kehadiran broker sebagai perantara di dunia birokrasi menurut Legg (1983) bahwa semestinya membantu seluruh kelompok masyarakat (terutama para kliennya) untuk mempermudah urusannya di birokrasi pemerintah dan swasta, sebab dunia birokrasi itu sendiri (utamanya di daerah) adalah broker dari broker yang lebih besar dalam hal pelayanan rakyat, namun berbeda dengan broker dalam ikatan patron-klien, karena bekerja dengan sistem yang jelas dan demi masyarakat luas. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa meluasnya tiga masalah ketimpangan sosial di wilayah ini di balik kebrokeran Latang adalah karena kebrokerannya berbentuk broker dalam broker, bentuk ini orientasinya hanya demi memperkaya diri sendiri dan melegalkan segala cara (utamanya korupsi, kolusi, dan nepotisme) dengan memanfaatkan fasilitas negara dan jabatan seseorang.

Sedangkan kebrokeran Ridwan yang menjadi perantara pemenangan pemilu bagi patron dan golongan elit politik, hal ini arahnya tidak jauh beda dengan pola kebrokeran Latang, yakni berkorelasi terhadap meluasnya 3 kondisi ketimpangan sosial di Bontorannu. Pada sub bab 4.2.1 juga nampak bahwa ketimpangan kepemilikan sumber daya (khususnya kekuasaan) antar golongan "Karaeng" (patron) dan golongan "To Samara" (klien) adalah karena semakin meluasnya kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan di Bontorannu. Bagi sebagian besar masyarakatnya yang hidup miskin dan terbelakang, kebrokeran Ridwan sangat diwarnai praktek-praktek memperdayai ataupun mengeksploitasi golongan ini demi kepentingan pribadinya. Di samping itu, warga yang tidak memahami keuntungan tertentu di balik seluk beluk dunia politik, ini menjadi komoditi kepentingan yang empuk bagi para broker politik demi memperkaya dirinya dan menambah praktek-praktek ilegal di dunia politik.

Dalam pandangan teori ikatan patron-klien, kehadiran broker sebagai perantara di dunia politik menurut Legg (1983) bahwa, kehadiran broker di negara-negara yang aturan politiknya sangat tegas, seorang broker hanyalah menjadi perantara dalam hal kepentingan politik partai dan keinginan politik rakyat pemilih, tanpa melibatkan orang perorang (caleg). Bargaining yang ditawarkan broker ke partai politik adalah konsep politik dari rakyat pemilih, sedangkan bargaining yang diinginkan partai adalah suara pemilih. Kedua bentuk bargaining position ini diatur secara transparan dan legal, berikut konsekuensi keuntungan bagi kedua belah pihak (dimana broker mendapatkan materi dan partai mendapatkan kekuasaan). Mengacu pandangan ini disimpulkan bahwa kebrokeran Ridwan belum sesuai dengan pola yang semestinya, dan ketidaksesuaian ini adalah gambaran lemahnya sistem perpolitikan itu sendiri dalam mengakomodir berbagai perubahan sosial yang tengah berlangsung.

Dari berbagai uraian di atas dapat dinyatakan bahwa, sebagai salah satu faktor yang menempatkan peran broker sebagai perantara terkait dengan pergeseran pola ikatan patronase, eksistensi peran ganda patron (selaku patron yang sekaligus sebagai broker) di ikatan vertikal, berlangsung di 3 aspek kegiatan, yakni sebagai perantara patron dan elitis untuk urusan birokrasi dan Perbankan, sebagai perantara patron dan elitis untuk urusan pemenangan pemilu (politik), dan sebagai perantara patron besar untuk urusan bisnis. Ketiga peran perantaraan ini nampaknya berkorelasi dengan pasang surutnya tiga kondisi masalah ketimpangan sosial di perdesaan, dimana di dua wilayah nampak ketiga kondisi tersebut semakin meningkat di balik kebrokeran seseorang, sedangkan di Amparita nampak ketiga kondisi tersebut mampu ditekan oleh peran kebrokeran seseorang.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran broker sebagai perantara terkait pergeseran pola ikatan patronase, yakni ketika peran ganda patron dan klien di dua ikatan mengikuti proses diferensiasi sosial dan mobilitas sosial, dimana diferensiasi peran patron memicu eksistensi broker di ikatan vertikal dan mobilitas peran klien yang memicu eksistensi broker di ikatan horizontal. Namun wujudnya berlangsung beda, karena di dua wilayah, peran patron sebagai broker lebih berorientasi ke keuntungan pribadi ketimbang membantu kaum bawah, juga peran klien sebagai broker belum mampu menggerakkan mobilitas sosial bagi kaum bawah. Sebaliknya di Sidodadi, akulturasi berhasil menempatkan peran broker sebagai pemacu mobilitas sosial yang ascending di dua ikatan, hal ini juga berkaitan dengan kemampuan para broker menekan masalah ketimpangan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsah Putra, Hs. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien Di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Akkas, Rusli. 1995. *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Watu, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*. Makassar: Unhas Pers.
- Alexander, J.C. 1992. *Durkheim's Problem and Differentiation Theory Today*. Dalam H. Haferkamp and N.J Smelser (Eds). *Social Change and Modernity*. California: California University Press.
- Amaluddin, M. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus Desa Bulugede, Kendal, Jateng*. Jakarta: UIP.
- Ang, Y. 2016. 'Co-Optation and Clientelism: Nested Distributive Politics in China's Single-Party Dictatorship'. *Studies in Comparative International Development* 51(3): 235–56
- Blau M. Peter. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. U.S.A. and London: Transaction Publishers.
- Blumer, Herbert. 1972. *Symbolic Interactions*. San Fransisco: Chandler Publ. Company.
- Boissevain, Jeremi. 1966. *Patronage in Sicily*. Man: Vol.1 (I).
- Boissevain, Jeremi. 1969. *Patrons and Brokers*. London: The Athlone Press.
- Campbell, John. 1968. *Two Case Studies of Marketing and Patronage in Greece*. The Hague: Mouton and co
- Chabot, H.T. 1950. *Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes*. Jakarta: Groningen.
- Di Mascio. 2014. *Exploring the link between patronage and party institutionalization: an historical-institutional analysis of the Italian transition*.  
file:///C:/Users/User/Downloads/Exploring\_the\_link\_between\_patronage\_and.pdf
- Effendi, Rusman. 1981. *Punggawa dan Pajjama*. Makassar: PLPIIS-Unhas.
- Elena Semenova. 2018. *Do patron-client relationships affect complex societies*.  
[https://www.researchgate.net/publication/329282124\\_Do\\_patron-client\\_relationships\\_affect\\_complex\\_societies](https://www.researchgate.net/publication/329282124_Do_patron-client_relationships_affect_complex_societies)
- Friedericy, H.J. 1933. *De Standen bij De Boegineezen en Makassaren*. Holland: Gravenhage
- Haerani, Any. 1996. *Ikatan Patron-Klien, Kemiskinan, dan Pengwilayahan Komuditas Unggulan Di Jeneponto*. Makassar: Unhas.
- Haferkamp, H, dan N.J. Smelser. 1992. *Social Change and Modernity* (halaman 97-119) Berkeley: University of California.
- Kooreman, J.P. 1883. *De Feitelijke Toestand in het Gouver-nementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden*. Holland.
- Legg, R. Keith. 1983. *Patrons, Client, and Politikans*. Berkeley: University of California Perss.
- Lemarchand, Rene. 1972. *Politikal Clientelism and Ethnycity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation-Building: American Political Science Review*, Vol. 65,
- Matthes, B.F. 1885. *Over de Ada's of gewoonten der Makassaren en Boegineezen*. Holland.
- Mattulada. 1995. *Latoa: Satu Lukisan Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Disertasi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Minullah. 1992. *Siapa yang Menikmati Revolusi Hijau di Sidrap*. Makassar: PPS Unhas.

- Paine, Robert. 1971. *A Theory of Patronage and Brokerage*. New York: Memorial University of Newfoundland.
- Parakkasi, Asmar, A. 1992. *Eksistensi Ikatan Patron-Klien Di Tengah Kemajuan Pertanian Agrobisnis Di Wonomulyo*. Ujung Pandang: PPS. Unhas.
- Pelras, Christian, 1981. *Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis-Makassar*. Makassar: Monografi.
- Redfield, Robert. 1959. *The Little Community and Peasant Society and Culture*. Phoenix: The Univ. of Chicago
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Robertson, Roland. 1988. *Sociology of Religion*. New York: Free Press
- Rogers, E.M. 1962. *Diffusion of Innovation*. New York: Free Press
- Scott, James.C. 1972a. *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. *The American Political Science Review* 66 (1).
- Scott, James.C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Silverman, Sydel. 1965. *Patronage and Community-Nation Relationship in Central Italy*. Roma: Etnology Press.
- Syamsuddin, Haris. 1990. *Eksistensi Ikatan Patron-Klien Di Tengah Meluasnya Pertanian Komersial Di Maros*. Ujung Pandang: LPPM Unhas.